

STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT DESA RAP RAP

LIFE SURVIVAL STRATEGY IN RAP RAP SOCIETY

Nyayu Fatimah¹

Abstrak

The present study describes food security in Rap Rap Village, Tatapaan sub-District, South Minahasa District. This qualitative study use interview and observation. The results show that mapalus, a traditional value, has become a valuable asset in a social life. It has been embedded as culture in the Village of Rap Rap as the wealth basis in the society. Besides, mapalus implies a reciprocity principle, requiring the members of the society to help each other, either in good or bad time. This solidarity as an extended family has become a key and a driving force in the society .

Keywords: poverty, food security, survival strategy

Abstrak

Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian tentang ketahanan pangan yang dilakukan di Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya wilayah Desa Rap Rap. Penelitian deskriptif ini bersifat kualitatif, dengan metode wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mapalus*, sebuah nilai tradisional, menjadi modal sosial dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang terinternalisasikan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut menjadi dasar bagi kesejahteraan kelompoknya. Selain itu, *mapalus* mengandung prinsip resiprositas, yaitu suatu pola kehidupan yang ada ikatan dan keharusan sosial dalam masyarakat untuk saling membantu secara timbal balik. *Mapalus* sudah berkembang baik dan telah menjadi modal sosial yang dipertahankan oleh masyarakat desa sehingga dalam kondisi sulit pun mereka masih saling membantu dan melindungi. Rasa kebersamaan sebagai satu keluarga luas adalah kunci dan motor penggerak bagi kehidupan sosial masyarakatnya.

Kata kunci: kemiskinan, ketahanan pangan, strategi bertahan hidup

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Email: fatimahdaihani@yahoo.com

Pengantar

Menurut Hall, Lindzey, Lochlin dan Manosevitz dalam buku *Introduction Theories of Personality* (1985), sebelum manusia mencapai tahap aktualisasi diri (*self actualization*), manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan biologis lainnya. Dengan demikian, masyarakat yang masih menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan dasarnya dapat dikelompokkan sebagai masyarakat pada tingkat bawah. Untuk memecahkan persoalan kemiskinan yang ada pada suatu masyarakat, peningkatan ketahanan pangannya, yaitu ketersediaan, ketercukupan, dan keterjangkauan harus dimulai. Hal ini dikarenakan kemiskinan dan ketahanan pangan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pada situasi seseorang mengalami kekurangan pangan karena kemiskinannya, maka kebutuhan untuk mencukupi hidupnya menjadi terhambat dan terjerumus kembali pada jebakan lingkaran kemiskinan. Namun demikian, dalam menghadapi situasi dilematis tersebut, masyarakat memiliki strategi tersendiri untuk bisa mempertahankan hidupnya (*survival strategy*) dengan meningkatkan ketahanan pangannya.

Isu tentang ketahanan pangan akhir-akhir ini sedang marak jadi bahan perbincangan berbagai kalangan, baik dari pihak pemerintah, teknokrat, cendekiawan, ilmuwan, maupun peneliti. Permasalahan ketahanan pangan tidak hanya dijumpai di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar kehidupan manusia. Tanpa pangan yang memadai, kehidupan ini tidak berarti. Walaupun perkembangan teknologi semakin canggih, bahan temuan di bidang pangan “artifisial” pun semakin luas, kebutuhan pangan yang berbasis pada sumber alamiah sampai saat ini masih tetap tidak tergantikan. Persoalan ketahanan pangan sesungguhnya menyentuh berbagai aspek yang cukup kompleks dan strategis untuk dikaji. Dengan demikian, penting untuk mengkaji permasalahan ketahanan pangan ini terutama dalam kaitannya dengan keadaan masyarakat yang serba kekurangan. Apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat desa yang relatif kekurangan, aspek penting yang berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan saat ini sangat banyak. Salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam kaitannya dengan keadaan masyarakat desa penelitian adalah pendidikan. Untuk itu pula tulisan ini akan membahas seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap ketahanan pangan masyarakatnya. Selain

itu, strategi penanggulangannya, termasuk untuk menghadapi tantangan di masa depan juga didiskusikan.

Masalah kemiskinan tidak pernah berhenti. Ia selalu ada dari dulu hingga sekarang. Permasalahannya sekarang adalah bukan mencoba untuk memberantas kemiskinan itu sendiri sehingga dari ada menjadi tidak ada, tetapi bagaimana persoalan kemiskinan itu sendiri tidak mencuat sehingga menimbulkan ketergantungan. Sikap ketergantungan menurut pandangan Lewis (1988) merupakan awal terbentuknya budaya kemiskinan. Ketergantungan, seperti pasrah dan *nrimo*, merupakan sikap hidup yang tidak mendukung bagi pengembangan diri. Apabila hal ini terus berlanjut dan terinternasionalisasikan dalam diri individu atau kelompok, maka dapat diasumsikan bahwa kebudayaan kemiskinan yang diungkapkan oleh Lewis (1988) dalam penelitiannya pada lima keluarga di Mexico, telah pula mewarnai kehidupan kelompok miskin Indonesia.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai adanya ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial menurut Suharto (2004) meliputi:

- (a) Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),
- (b) Sumber keuangan (pekerjaan, kredit),
- (c) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),
- (d) Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
- (e) Pengetahuan dan keterampilan, dan
- (f) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Keenam basis kekuasaan sosial tersebut dapat menjadi dasar bagi tingkat perkembangan individu dalam kehidupannya. Kepemilikan salah satu basis tersebut dapat menjadi satu kekuatan bagi seorang individu untuk lepas dari jerat kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan juga dapat menimbulkan adanya kekurangan pangan bagi penduduknya. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain” (Alkaff, 2012: 26). Berdasarkan definisi tersebut, dampak dari kemiskinan menyangkut pada aspek ketahanan pangan. Menurut pendapat Susanto (2012), ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan

pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Seringkali konsep ketahanan pangan dapat digunakan dalam konteks kebijakan dan politik pangan pemerintah, untuk menyatakan sejauh mana negara dan masyarakat tercukupi pangannya, dan tidak pada substansi ketahanan pangan sebagai upaya penguatan kapasitas. Dalam undang-undang RI Nomor 7 tahun 1996 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Maleha & Susanto, 2006).

Subsistem ketersediaan pangan mencakup berbagai aspek, yaitu produksi, cadangan, serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola dengan baik. Volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup dari sisi jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu, walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas, dan tersebar antarwilayah.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mencoba melihat adanya keterkaitan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan yang ada pada masyarakat Desa Rap Rap di Kabupaten Minahasa Selatan. Masyarakat desa ini dapat dimasukkan pada kategori masyarakat miskin, karena pada tahun 80-an menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan pemerintah melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Desa Rap Rap: Masyarakat di Ambang Perubahan

Desa Rap Rap merupakan sebuah desa yang baru dimekarkan dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Tatapaan. Dilihat dari luas wilayahnya, Desa Rap Rap adalah desa terluas di Kecamatan Tatapaan, yaitu 13.4 hektar (ha) (9,09% dari total luas kecamatan). Desa ini merupakan sebuah desa pedataran yang berada di daerah pesisir dengan ketinggian 3 meter (m) dari laut. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan sekitar 28 kilometer (km). Sementara itu, jarak dari desa ke ibukota kabupaten adalah 41.1 km. Untuk aktivitas ekonominya, terdapat sepuluh kedai makanan, sembilan toko kelontong, dan pasar permanen. Pelayanan kesehatannya hanya dilayani oleh dua tenaga kesehatan dan dua bidan. Sementara itu, untuk pembinaan kesehatan anak telah dibangun Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) dan Pusat Kesehatan Desa.

Berdasarkan data Kecamatan Tatapaan, jumlah penduduk Desa Rap Rap pada akhir tahun 2010 berjumlah 1.278 jiwa yang terdiri dari 679 laki-laki dan 599 perempuan dengan 355 Kepala Keluarga (KK).

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kecamatan, yaitu 8.965 jiwa yang tersebar di sebelas desa, maka Desa Rap Rap merupakan sebuah desa dengan jumlah penduduk terbanyak sekecamatan, yaitu 14%. Dilihat dari mata pencahariannya, mayoritas penduduk bergerak di sektor pertanian (1055 jiwa), di mana 30 jiwa diantaranya bekerja sebagai buruh tani. Sebanyak 87 jiwa adalah nelayan. Sementara itu, sisanya bergerak di sektor lain, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), montir, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan lain-lain.

Secara geografis, Desa Rap Rap berbatasan dengan Desa Arakan yang berada di sebuah teluk yang disebut Teluk Arakan. Lokasi desa ini terletak cukup jauh dari jalur lintas jalan trans-Sulawesi, yaitu 22 km dari arah utara yang melewati kecamatan Tanah Wangkoan dengan kondisi jalan relatif baik karena sedang dalam proses perbaikan. Untuk sampai ke Desa Rap Rap, seseorang dapat juga melalui jalur selatan melewati Kecamatan Tatapaan dengan jarak tempuh yang lebih jauh, yaitu 32 km dengan kondisi jalan yang lebih jelek dari jalur utara.

Secara administratif, Desa Rap Rap terdiri atas empat kampung atau dalam istilah setempat disebut “jaga”, dengan kepala jaganya yang disebut “maweteng”. Dinamika kehidupan yang demokratis di desa ini relatif kondusif. Pada saat pemilihan kepala desa (Pilkades), gejolak politik yang biasa mewarnai ajang ini, seperti keributan atau pertarungan antarpemilihan calon, tidak muncul ke permukaan. Potensi konflik teredam oleh adanya ikatan sosial yang kuat di antara warganya sendiri. Selain itu, nilai-nilai lama yang masih berdasarkan keturunan (*ascribed*) dalam pemilihan kepala desa masih tetap kuat dan tetap menjadi prioritas. Hal ini terbukti dari kepala desa terpilih adalah orang yang secara sosial merupakan tokoh yang memiliki kaitan dengan pendiri desa ini atau orang yang dituakan. Sikap demokratis “semu” di desa ini, di mana pimpinan yang terpilih oleh warganya melalui jalur demokratis yang diikat oleh nilai-nilai tradisionalnya, telah dapat memberikan peluang bagi “hukum tua” (kepala desa)-nya untuk bekerja sesuai dengan keinginan masyarakatnya.

Sebagai sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan, maka wajarlah bila di desa ini banyak didirikan gereja. Tercatat terdapat enam gereja dengan enam aliran, yakni (a) Gereja Masehi Injili di Minahasa (Gemin), (b) Gereja Pantekosta Desodai Indonesia (GPDI) Sondaken, (c) GPDI Mawarsaron, (d) Gereja Betel Indonesia (GBI), (e) Advent, dan (f) Gereja Masehi Protestan (Gempi).

Sementara itu, masjid tidak terdapat di Desa Rap Rap. Masjid terdekat ada di Desa Arakan, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua desa itu semula bersatu dalam satu desa administratif. Pemekaran menjadi dua, yaitu Rap Rap dan Arakan terjadi pada tahun 2007 dikarenakan alasan administratif dan kondisi sosial masyarakatnya dengan nilai-nilai keagamaan yang berbeda, yaitu Islam dan Kristen. Alasan lain yang bersifat naif adalah faktor pemenuhan bantuan dana dari pusat. Dengan terbentuknya dua desa, bantuan yang diterima oleh dua desa tentunya lebih banyak dan menguntungkan bagi masyarakat kedua desa tersebut dibandingkan bila hanya satu desa saja.

Sebagai sebuah desa yang posisinya berada di daerah pesisir pantai dan perbukitan, pekerjaan penduduk desanya adalah petani dan nelayan tradisional dengan menggunakan perahu ketinting.² Petani di sana dapat dikategorikan dalam tiga tipe, yaitu (a) petani yang bertanam tanaman muda seperti pisang, (b) petani bulanan yang bercocok tanam pada pertanian tadah hujan dengan tanaman musiman, seperti jagung dan padi, serta (c) petani perkebunan tahunan yang menanam tanaman cengkeh dan kelapa. Penduduk Desa Rap Rap umumnya adalah petani kebun tadah hujan. Mayoritas dari mereka tidak memiliki tanah yang cukup luas untuk bertani. Kebanyakan lahan ditanami umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan seperti ketela (ubi jalar dan rambat), jagung, dan beberapa jenis pisang.

Sekitar 40% penduduk Desa Rap Rap tidak memiliki lahan pertanian. Mereka umumnya bekerja dengan mengandalkan upah di perkebunan coklat di wilayah Pangkor Wawontular. Akibatnya, sebuah ungkapan beredar di sana, yaitu “ikut makan gaji” yang berarti kehidupan masyarakat yang mengandalkan upah bulanan dari perkebunan coklat. Tempat kerja mereka jaraknya relatif jauh dari desa. Namun demikian, mereka tidak mendapat kesulitan karena perusahaan memberikan fasilitas antarjemput. Perusahaan menyediakan tiga buah kendaraan yang mereka sebut “oto” yang mengantar dan menjemput para pekerja dari Desa Rap Rap dan sekitarnya.

Sementara itu, perlakuan berbeda dialami oleh buruh lepas. Sebagai buruh harian, mereka tidak memperoleh pelayanan transportasi

²Dari sekitar 386 kepala keluarga (1.317 jiwa), sebanyak 87 orang adalah nelayan dan 1.055 orang adalah petani (Monografi Desa Rap Rap, 2011).

dan jatah makan, baik siang maupun malam. Artinya, mereka yang bekerja sebagai buruh lepas harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk biaya harian, baik makan maupun transportasi. Selain itu, pola pemberian upah antara pekerja upah harian dan pekerja tetap berbeda. Pekerja tetap mendapatkan upah sesuai dengan peraturan formal yang berlaku dalam perusahaan, sedangkan pekerja tidak tetap hanya menerima upah sesuai dengan lama jam kerja. Sebagai contoh, mereka memperoleh upah Rp.50.000 untuk yang bekerja jam 07.00-14.00 dan Rp.75.000 untuk yang bekerja sampai jam 17.00.

Pekerja lepas mendapat perlakuan yang sama bila mereka bekerja di luar perusahaan, yaitu bekerja pada milik perorangan. Namun demikian, sistem pemberian upah pada pemilik perorangan adalah bagi hasil. Pembagian hasil dengan menggunakan “persentase” atas hasil panen. Biasanya pembagian hasil dikonversi dari naturanya, yaitu sebesar 100 kg hasil panen, diberikan sebesar 50% bagi pemilik lahan.

Selain bekerja sebagai buruh perkebunan, terdapat juga penduduk yang bekerja sebagai petani. Pada umumnya penduduk Desa Rap Rap adalah petani penggarap, dan sedikit sekali yang petani pemilik. Hasil penelitian menunjukkan bila dalam kaitannya dengan pemberian upah kerja berbeda antara buruh tani di bidang pertanian sawah tadah hujan. Sebagai buruh tani, upah yang berlaku adalah berdasarkan sistem bagi hasil (“maro”) atau dalam istilah setempat disebut “*sukei*”. Antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya mendapatkan bagian yang sama, yaitu separuhnya.

Secara historis, desa ini pada mulanya hanya sebuah lahan hutan yang tidak berpenghuni. Kedatangan orang pertama ke daerah ini membuatnya berkembang menjadi sebuah desa. Orang pertama yang diceritakan datang ke wilayah ini pada tahun 1800 adalah orang Kaili dari Sulawesi Tengah dan Sangihe yang datang untuk mencari persinggahan di saat mereka melaut untuk mencari ikan. Di wilayah ini terdapat sebuah teluk yang strategis sebagai tempat persinggahan, yaitu Teluk Arakan. Di tempat ini mereka membuat rumah-rumah kecil yang disebut *daseng* atau *saboa* sebagai tempat persinggahan. Dalam kurun waktu selanjutnya berdatangan orang dari Sangir, Tagulandang, dan Siau. Mereka bersama tinggal di *daseng-daseng* tersebut bersama keluarga yang mereka bawa dari kampung halamannya.

Pada suatu waktu daerah tersebut terkena wabah penyakit, sehingga mereka harus pergi mengungsi mencari tempat aman. Satu-

satunya wilayah yang dapat mereka tempati adalah daerah wilayah hutan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mereka pergi ke perbukitan ke daerah hutan yang disebut Rano Wailan dan Rano Potan. Di hutan itu mereka membuat pondokan sebagai tempat tinggalnya. Secara administratif wilayah hutan ini berada di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri. Mereka tidak hanya membuat rumah sebagai tempat mereka bernaung, namun juga melakukan aktivitas kerja, seperti membuka hutan dan berkebun. Dampak ikutan dari terjadinya gerak masyarakat ke daerah hutan tersebut adalah terbentuknya satu wilayah pemukiman baru dari penduduk yang berasal dari Pesisir Arakan. Seperti telah dijelaskan, di wilayah ini, masyarakatnya bertani pada lahan hutan yang mereka buka. Sejak saat itu pula wilayah hunian semakin meluas ke wilayah perbukitan.

Dengan mulai terbukanya wilayah tersebut, tempat usaha penduduk juga bertambah. Selain pergi melaut, mereka juga melakukan kerja di darat sebagai petani kebun. Mereka menanami pohon-pohon yang cocok dengan kondisi lahan setempat, seperti kelapa, dan pohon tahunan lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, kebun-kebun itu diakui sebagai hak milik mereka.

Upaya Penyesuaian tanpa Akhir

Ikatan kekerabatan yang cukup kental di antara keluarga dari masing-masing suku tersebut, secara otomatis telah membentuk satu *enclave* kekerabatan. Mereka hidup bersama untuk satu sama lain dapat saling menjaga dan menolong di kala ada kesulitan. Kehidupan yang terbentuk dalam satu kelompok kekerabatan menunjukkan adanya suatu keadaan atas sikap *security feeling* yang akan menjadi cikal bakal bagi kehidupan yang “endogami”.

Namun demikian, tatanan nilai yang terbentuk sebagai nelayan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial budaya mereka, ternyata tidak dapat membendung keinginan untuk melaut. Cara kehidupan bercocok tanam di kebun dari hutan yang mereka buka, ternyata tidak cocok dengan hati nurani dan keahliannya sebagai nelayan. Pada akhirnya, mereka kembali melaut. Sementara itu, pondok di hutan didiami oleh istri dan anak yang tidak ikut melaut. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi kawin mawin di antara mereka dan membentuk keluarga luas patrilineal.

Pada tahun 1918 mereka berinisiatif untuk membuat sebuah desa sendiri karena penduduknya sudah semakin berkembang. Desa ini adalah desa persiapan dan melepaskan diri dari desa induknya selama ini, yaitu Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri. Desa persiapan ini mereka beri nama Rap Rap-Arakan yang artinya lembah. Karena nama Arakan yang selama ini mereka ketahui sebagai penyebutan tempat awal persinggahannya lebih berkonotasi sebagai sebuah tanjung, nama tersebut dianggap kurang tepat digunakan di tempat baru.

Dapat dikatakan bahwa Desa Rap Rap, terbangun oleh adanya migrasi penduduk dari wilayah Sangir. Baru pada tahun 1920, secara definitif daerah ini menjadi sebuah desa dan masuk ke dalam Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, terpisah dari Desa Poopoh dari Kecamatan Tombariri. Alasan kepindahan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Camat Tombariri yang dipindahtugaskan untuk menjadi camat di Kecamatan Tumpaan. Sang camat merasa bertanggung jawab membina desa yang semula berada dalam wilayah pengawasannya. Camat tersebut mengambil kebijakan untuk membawa penduduk di desa baru tersebut ke dalam wilayah administratif barunya di Tumpaan ketika ia menjadi camat di Tumpaan. Dengan demikian, camat merasa lebih mudah untuk membinanya.

Secara sosial budaya, terdapat perbedaan antara penduduk Kecamatan Tumpaan dengan penduduk di Kecamatan Tombariri. Tumpaan masuk ke dalam budaya Minahasa Totembua. Dilihat dari daerah kebudayaannya (*cultural area*), Tumpaan lebih dekat dengan budaya di Tanah Wangko yang masuk sebagai bagian dari budaya Totumbulu.

Pada tahun 2007, pemekaran kecamatan di daerah tersebut menghasilkan Kecamatan Tumpaan dan Tatapaan. Desa yang menjadi objek penelitian ini terdapat di wilayah Kecamatan Tatapaan. Sekitar enam bulan setelah pemekaran kecamatan, terjadi pula pemekaran perdesaan. Dalam hal ini, wilayah Desa Rap Rap yang memiliki jumlah penduduk cukup besar serta dengan luas wilayah yang luas, dirasa perlu untuk dipecah menjadi dua desa, yaitu Desa Rap Rap dan Arakan,³ yang

³Pemberian nama Desa Arakan menghasilkan perdebatan karena semula usul pemberian nama desanya adalah Rap Rap I dan Rap Rap II. Namun demikian, salah seorang tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemberian angka I dan II itu tidak tepat. Menurutnya, hal ini memberi konotasi peringkat yang tidak sama. Pemberian angka I seolah-olah dinilai lebih baik

memudahkan dalam pengeloalaannya. Terjadinya pemekaran kedua desa tersebut tidak menimbulkan gejolak bahkan menjadi satu pemecahan yang baik. Jika dilihat dari konteks sosial, maka aspek sosial budaya dari kedua desa tersebut memiliki tatanan nilai berbeda. Mayoritas penduduk Desa Rap Rap beragama Kristen, sedangkan mayoritas penduduk Desa Arakan beragama Islam. Hal itu pula yang lebih memudahkan proses pemekaran yang berlangsung di daerah ini.

Demikian pula bila dilihat dari aspek sejarah yang dipahami masyarakat, dikatakan bahwa penduduk Desa Arakan berasal dari penduduk yang datang dari Kaili dan Sangir yang secara sosial mereka adalah nelayan. Sementara penduduk Desa Rap Rap umumnya mereka berasal dari Sangihe yang secara sosiokulturalnya mereka hidup sebagai petani kebun. Kedua perbedaan masyarakat seperti itu pulalah yang telah memberikan landasan bagi pemekaran desa dan memberikan jalan yang terbaik bagi penduduk desa ini.

Sekitar tahun 1930, orang Bajo dari Nain datang ke Kampung Arakan. Kampung ini awalnya merupakan persinggahan orang Kaili. Kebanyakan orang Kaili adalah nelayan sehingga mereka tidak pernah menetap lama di suatu daerah. Bagi mereka kedatangannya di suatu daerah hanyalah untuk mencari usaha, sampai kemudian mereka menganggap sudah memadai, kemudian mereka akan berpindah ke tempat lain, karena mereka pun merasa tidak nyaman untuk berlama-lama tinggal di suatu tempat, dan memutuskan untuk bermigrasi ke daerah lain. Dengan demikian, pada saat orang-orang Bajo tiba di tempat itu, orang-orang Kaili sudah tidak ada di wilayah tersebut. Orang Kaili adalah prototipe nelayan yang terbiasa hidup berpindah-pindah (*nomaden*). Sementara itu, orang Bajo yang datang belakangan memiliki ciri sebagai masyarakat membawa nilai-nilai kebersamaan sesama suku yang cukup kuat. Nilai kebersamaan tersebut menghasilkan sifat *ingroup* yang memberikan ciri pengelompokan komunal. Sikap yang *ingroup* mengabaikan ikut campur dengan suku lain serta diikuti oleh sistem kepercayaannya yang kuat terhadap kaidah-kaidah Islami membuat

daripada II, sehingga hal itu dianggap tidak *fair*. Untuk menentukan mana yang menjadi nomor I dan II mari kita bersaing. Beliau memberikan solusi untuk mengembalikannya pada nama asli daerah ini yang terletak di Tanjung Arakan. Akhirnya usul memberi nama sesuai dengan nama daerah tersebut disetujui dan jadilah nama desa Arakan. Sementara itu, Desa Rap Rap tetap dengan namanya semula.

kelompok masyarakat dari suku Bajo ini memutuskan untuk hidup terpisah dari kelompok masyarakat Sanger yang Kristiani. Sejak kedatangannya, mereka sudah memisahkan diri dan mencari tempat tinggal sendiri yang mereka namakan sebagai Desa Bajo karena mayoritas penduduknya adalah berasal dari Bajo. Selain itu, orang Bajo juga dikenal sebagai suku laut yang kehidupannya berkaitan dengan kehidupan nelayan. Sementara itu, orang Sanger adalah suku darat yang memiliki kehidupan dan menerapkan sosialisasi pada anak-anaknya pada konsep-konsep kehidupan darat. Mereka dididik untuk dapat berkebun, berbeda dengan suku Bajo yang mendidik anak-anaknya melaut.

Walapun terdapat beberapa perbedaan dalam pandangan hidupnya, baik suku Bajo maupun Sanger, dalam kehidupan soisialnya bisa hidup berdampingan. Hal itu terungkap dari adanya pemahaman sejarah yang sama mengenai asal usul mereka yang berasal dari Mindanao Filipina. Menurut informan yang diwawancarai, pertengkaran yang adakalanya muncul dapat ditoleransi dengan adanya persamaan sejarah tersebut. Dengan demikian, pertengkaran tidak sampai meluas dan membesar.

Pendidikan sebagai Wahana Perubahan Sosial

Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti meningkatnya kesejahteraan keluarga. Untuk mengetahui kondisi penduduk antara lain dapat dilihat dari angka partisipasi penduduk dalam kegiatan sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Untuk itu tentu saja menjadi penting untuk mengetahui keadaan pendidikan di desa penelitian ini dan seberapa jauh sudah ada kepedulian terhadap pendidikan dari pihak pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik adalah orang yang melek pendidikan dan pengetahuan.

Dalam kaitannya dengan keadaan pendidikan penduduk desa, berdasarkan data dari desa dapat diketahui bila keadaan pendidikan penduduk Desa Rap Rap relatif masih rendah atau sekitar 82.09% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Sedangkan yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat sejumlah 447 orang. Sementara itu, masih terdapat sebanyak 174 jiwa yang tidak tamat SD. Berdasarkan data desa tercatat sebanyak 205 jiwa yang lulus SMP sederajat dan 70 jiwa yang tidak tamat. Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 158 jiwa, dua orang mendapat pendidikan D3, serta

sebelas orang tamat S1. Saat ini terdapat seorang penduduk yang mengikuti pendidikan S2 dan menurut informasi, yang bersangkutan akan mengabdikan dirinya sebagai guru di desanya. Kondisi pendidikan yang rendah secara langsung atau tidak, berpengaruh terhadap upaya peningkatan kehidupan yang maksimal. Artinya dengan pendidikan yang rendah, berbagai akses yang seharusnya dapat diraih terpaksa ditinggalkan. Sebagai contoh, penduduk kehilangan kesempatan untuk mendapat pekerjaan di perusahaan perkebunan sebagai pegawai bagian administrasi karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikannya. Pada akhirnya, mereka harus menerima bekerja sebagai kuli kasar (buruh) yang tidak butuh pendidikan formal, tetapi cukup dengan kemampuan fisik saja.

Keterbatasan pendidikan itu tidak luput dari lambatnya perkembangan fasilitas pendidikan di desa ini. Sejak tahun 1930, pemerintah kolonial telah menyediakan pendidikan setingkat sekolah dasar yang pada waktu itu ditempatkan di gereja-gereja yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Rakyat. Sayangnya, pada saat kemerdekaan baru pada tahun 1970 sekolah dasar berdiri di Desa Arakan dan tahun 1988 barulah SMP ada di sana. Bahkan, SMA baru diadakan pada tahun 2012.

Artinya, sampai tahun 1988 anak-anak usia sekolah belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkatan yang lebih tinggi. Selain karena sarana pendidikan yang terbatas, SMP berada di luar daerahnya. Anak-anak harus pergi ke kecamatan lain yang jaraknya cukup jauh, bahkan ada juga yang harus meninggalkan desanya dan merantau ke Kota Manado yang ditempuh lebih dari satu jam perjalanan. Dengan adanya kendala transportasi dan biaya yang tidak sedikit, cukup beralasan bila keadaan pendidikan penduduk Desa Rap Rap dan sekitarnya relatif rendah. Kebanyakan penduduk di sana hanya berpendidikan setingkat SD saja, bahkan ada juga yang tidak pernah mengenyam pendidikan.

Perkembangan pendidikan mulai terasa di tahun 80-an dengan dibukanya SMP bernama SMP LKMD. Status sekolah tersebut belum negeri. Sekolah itu merupakan swadaya dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Jika pada angkatan I diangkat empat guru, maka pada angkatan II diangkat dua guru. Sementara itu, pada angkatan III jumlah guru yang berasal dari desa menjadi 20 orang. Mereka digaji oleh desa sebagai guru honor. Sekolah LKMD ini sampai tahun 1993/1994 masih ditangani oleh

pemerintah Desa Rap Rap. Jumlah murid saat itu sepuluh orang di mana hanya lima orang yang berhasil menyelesaikan sekolahnya. Tahun 1994 mulai dibangun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang akan menampung anak didik yang ada di lima desa di sekitar Desa Rap Rap, yaitu Desa Pungkul, Sondaken, Rap Rap, Arakan, dan Pinasungkulen. Pada tahun 1996 keadaan mulai berubah, di mana minat penduduk terhadap pendidikan mulai meningkat. Saat itu orang tua mulai ramai menyekolahkan anaknya, walaupun baru sampai SMP saja. Saat itu, belum ada siswa yang melanjutkan ke SMA.

Berdasarkan data tahun 2011/2012 jumlah siswa di SMPN 3 Tumpaan dari kelas I-III tercatat sebanyak 140 orang. Posisi murid kelas IX adalah sebesar 29 orang, 15 orang diantaranya berasal dari Desa Rap Rap. Adapun murid kelas VIII terdapat 59 orang dengan komposisi murid dari Desa Rap Rap terdapat 23 orang, dan kelas VII sebanyak 50 orang murid yang setengahnya adalah murid dari Desa Rap Rap. Dilihat dari persentase murid yang ada tersebut, tampak bahwa animo bersekolah bagi penduduk Desa Rap Rap sudah mulai meningkat. Hal itu dapat dilihat dari keinginan untuk meneruskan ke tingkat SMA. Sebagaimana data di atas, lulusan murid SMP di SMP Negeri Tumpaan, pada tahun ajaran 2011/2012 terdapat sebanyak 29 orang murid, dan yang meneruskan pendidikannya ke tingkat SMA ada sebanyak 21 orang. Mereka meneruskan pendidikannya ke SMA di kecamatan lain, karena saat itu di Desa Rap Rap belum memiliki SMA. Sebanyak delapan orang sisanya mendaftar di SMA yang baru dibangun di Desa Rap Rap.

SMA di Desa Rap Rap baru dibuka pada Juni 2012 dengan jumlah murid sebanyak sembilan orang. Mereka sebetulnya adalah murid yang mendaftar susulan setelah mengetahui ada SMA di desanya. Sebelumnya, mereka tidak mendaftarkan diri untuk bersekolah ke SMA. Menurut mereka, tidak mudah untuk menyekolahkan anaknya di SMA yang ada di Tanah Wangkoan karena biaya transportasi dan biaya hidup selama anaknya bersekolah di sana cukup besar. Mereka tidak sanggup mengeluarkan biaya ekstra untuk pendidikan anaknya tersebut. Betapa besar luapan kegembiraan yang mereka rasakan setelah mengetahui pemerintah membuka sekolah setingkat SMA di desanya. Hal itu terbukti, ketika sekolah tersebut dibuka, mereka pun langsung mendaftarkan anaknya. Bahkan ada orang tua yang anaknya sudah bersekolah di SMA Tanah Wangkoan pun terpikir untuk menyekolahkan anaknya ke SMA di desanya ini. Namun kepindahan saat ini masih terhalang oleh rasa “gengsi”, karena secara fisik sekolah SMA ini masih darurat, tempatnya

masih menumpang di Balai Desa Rap Rap. Ruang belajar masih sangat terbatas dan jumlah guru juga masih belum memadai. Alasan yang mereka kemukakan adalah “tidak bergengsi” bila harus bersekolah di sekolah seperti itu. Menurut para siswa itu, mereka baru akan pindah bila gedung sekolah yang saat ini sedang dibangun di dekat gedung SMP sudah selesai. Secara psikologis, hal itu dapat dimaklumi. Tentu saja keberadaan SMA merupakan angin segar bagi desa ini. Upaya untuk dapat meningkatkan desanya menjadi desa yang maju dengan SDM yang memadai menjadi harapan bagi perkembangan Desa Rap Rap di masa depan.

Hubungan Ketahanan Pangan dan Kemiskinan

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, penduduk Desa Rap Rap mayoritas beragama Kristen. Aktivitas kehidupan sehari-harinya mencerminkan kehidupan keagamaan, seperti kebaktian setiap Sabtu atau Minggu, atau kegiatan yang dibuat oleh kelompok-kelompok gereja, seperti arisan atau acara khusus kelompok yang dibagi atas kelompok laki-laki dan perempuan. Setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, tetapi tidak menjadi penghalang bagi mereka. Karena dalam konsep Kristen, gereja adalah tubuh manusia. Bila dianalogikan maka kita akan melakukan apapun demi kebaikan tubuh kita dan biaya tidak akan menjadi kendala.

Secara makro sosial, Desa Rap Rap termasuk desa yang paling banyak penduduk miskinnya, yaitu sejumlah 215 jiwa dari 1583 jiwa penduduk miskin yang ada di Kecamatan Tatapaan, atau hampir 25% dari jumlah penduduk Desa Rap Rap yang berjumlah 1.278 jiwa masuk dalam kelompok miskin. Terkelompoknya penduduk miskin dalam pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut didasarkan atas konsep kemiskinan sebagai suatu keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak seperti tidak dipenuhinya kebutuhan minimum untuk pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2012). Dengan konsepnya itu, maka BPS mengadopsi kriteria yang diberikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),⁴ yaitu keluarga prasejahtera dan telah

⁴BKKBN memberikan kriteria keluarga miskin yang disebut sebagai keluarga pra sejahtera berdasarkan kriteria makan sehari dua kali, memiliki pakaian yang berbeda dalam setiap kesempatan, rumahnya yang terbuat dari atap, lantai, dan dinding yang baik, sakit dibawa ke sarana kesehatan, dan lain-lain.

melakukan pendataan keluarga miskin di wilayah ini. Konsep kemiskinan tersebut menunjukkan adanya berbagai dimensi kemiskinan seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang dipengaruhi oleh sudut penggambaran kemiskinan itu. Dalam hal ini mungkin dapat disimak dari dimensi kemiskinan menurut SMERU (diambil dari Hendra, 2010), yang membaginya menjadi berbagai dimensi, yakni: *pertama* dilihat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, yaitu pangan, sandang dan papan; *kedua* pada dimensi tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, yaitu kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi; *ketiga* adalah dari tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga; *keempat* adalah adanya kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal; *kelima* rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan sumber alam; *keenam* tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat; *ketujuh* adalah tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; dan *kedelapan* adalah ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Berdasarkan dimensi tersebut, kemiskinan yang ada di daerah penelitian dapat diketahui. Jika menganalisis dimensi pertama, yang dilihat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang, dan papan, Desa Rap Rap tidak terlalu menonjol. Dalam konteks sosial ini, salah satu hal yang berkaitan dengan siklus keagamaan, nilai-nilai dalam ritual keagamaan yang mereka jalani telah mendorong mereka untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan “Tuhan Yesusnya”. Hal ini juga diaktualisasikan dalam bentuk kebiasaan mereka untuk berpenampilan “cantik” atau *sophisticated* yang secara fisik kelihatan menonjol. Simbolisme dalam bentuk fisik itu mereka ungkapkan dengan kata-kata “biar kalah nasi jangan kalah aksi”. Artinya, mereka lebih mengutamakan penampilan fisik yang tampak dari luar. Penampilan yang dapat dilihat secara fisik oleh orang lain, mencerminkan atribut baiknya saja. Kecenderungan ini adalah upaya untuk dapat menutupi rasa malu dengan keadaan kekurangan yang sesungguhnya.

Bila dilihat dari kebutuhan pangan jangka pendek untuk kebutuhan subsistennya, mereka mendapatkan bahan pangan dari lingkungannya, seperti ikan dari laut, sayuran dari tanaman di halamannya atau ubi kayu yang mereka tanam. Mereka mendapatkan makan secara layak dalam sehari-hari seperti kecukupan protein dan

nabatinya. Bahkan mereka juga terbiasa makan jenis makanan yang disebut “milu”, yaitu makanan pokok yang terbuat dari campuran jagung dan beras. Makanan ini sudah terinternalisasikan dalam kehidupan sosialnya sehingga sudah menjadi kebiasaannya. Namun demikian, kebutuhan sandang dan papan dalam program jangka panjang bagi kehidupannya, tampaknya belum menjadi prioritas. Bila dilihat dari kondisi yang nampak, seperti keadaan rumah yang beralaskan tanah, tentu saja tidak sehat bila dilihat dari aspek kesehatan. Peralatan rumahnya juga tidak memadai. Keadaan seperti itu merupakan sebuah fenomena kemiskinan yang merupakan bentuk dari budaya hidup miskin yang dianggap sebagai produk sosial kolektif. Produk budaya ini pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang kondusif di mana individu larut atau tidak berdaya di dalamnya, karena memang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya (Darwin, 2005).

Sementara dimensi kedua, ketiga, dan kelima, seperti tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi, jaminan masa depan, keterbatasan sumber daya, tampaknya ketiga dimensi tersebut secara dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Rap Rap dan dapat menjadi ukuran bagi keadaan kemiskinan di desa ini. Melalui uraian tentang kondisi makro daerah ini terlihat keterbatasan akses terhadap sarana dan fasilitas pada bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Keterbatasan akses ditengarai dapat menghambat tingkat mobilitas sosialnya. Mobilitas memang merupakan salah satu strategi yang penting bagi manusia untuk dapat mengubah dirinya dan menambah pengetahuan dan informasi agar lebih terbuka wawasan hidupnya. Dilihat dari tatanan kehidupan sosialnya, tampak bahwa adanya keseragaman dalam bentuk personifikasi diri memberikan kesan sebagai “orang mampu” yang ditunjukkan dengan simbol-simbol fisik. Sikap untuk memahami tatanan sosialnya itu, seperti bentuk-bentuk personifikasi diri telah menjadi senjata pamungkas dalam mengembangkan strategi bertahan hidup.

Dilihat secara individu maupun kelompok, mereka menutupi kekurangannya dengan bersembunyi di balik semua atribut fisik yang ditampilkan. Pada saat-saat tertentu, seperti mengikuti misa di gereja atau acara rutin mingguan, seperti arisan atau pertemuan kelompok gereja, atau juga pada saat-saat ada perayaan adat (kawinan), mereka menunjukkannya dengan cara *show off* melalui penampilannya. Bagi yang tidak mengenal budaya setempat mungkin akan “terkecoh” dengan gemerlap

penampilan yang ditunjukkan bak orang kaya itu, atribut-atribut yang ditonjolkan, seperti sepatu mengkilat, baju yang bagus dan rapi. Penampilan fisik memang dapat menipu, karena pada kenyataannya kehidupan penduduk miskin Desa Rap Rap pada umumnya masih jauh dari memadai. Sebagai contoh, salah satu indikator yang dibuat BKKBN adalah tentang keadaan perumahan penduduk. Dilihat dari aspek pemukiman dan perumahannya, pada umumnya penduduk miskin Desa Rap Rap berada pada rumah yang luas bangunannya kecil, berlantai tanah, kamar tanpa pintu dan bahkan tanpa ranjang, hanya tikar yang digelar beralaskan kayu atau tikar rami. Rumahnya sederhana tanpa perabotan yang berlebihan dan hanya sekedarnya saja. Tentu saja keadaan rumah seperti itu menurut ukuran BKKBN jauh dari kategori sehat dan memadai.

Ada perbedaan dalam menyikapi kehidupan sosial keseharian yang ada di Desa Rap Rap dengan kehidupan keagamaan seperti yang dijelaskan terdahulu. Namun demikian, indikator tampilan fisik belum menjadi ukuran yang representatif bagi keadaan di Desa Rap Rap ini. Keadaan fisik rumah tidak menjadi ukuran yang mengganggu kehidupan sosial. Dengan hanya menilai keadaan penduduk desa ini sebagai kelompok miskin atau bukan dari keadaan rumahnya dapat mematahkan argumen tentang kemiskinan yang ada di desa ini. Hal ini dapat dibuktikan dari temuan penelitian yang bertolak belakang dari asumsi semula. Dilihat dari keadaan fisik rumahnya, beberapa penduduk desa dapat dikategorikan sebagai sebagai keluarga miskin. Namun demikian, mereka tidak dikatakan miskin karena mereka memiliki lahan kebun yang luas.⁵ Secara kasat mata, rumah keluarga tersebut masuk dalam kategori dari BKKBN seperti disebutkan di atas, yaitu dinding dari gedek, lantai yang disemen dan setiap kamar tanpa ada pintu, hanya berpintu tirai. Hal itu tidak memadai sebagai sebuah rumah tinggal dari orang yang tergolong kaya. Dari hasil wawancara dengan penduduk dengan ciri rumah seperti itu, ternyata mereka tidak dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Mereka memiliki lahan yang cukup luas dan mempunyai pekerja untuk menggarap lahan tersebut. Dengan demikian, kriteria BKKBN menjadi bias. Bagi desa ini yang menjadi ukuran

⁵Keluarga Bapak Manopo (bukan nama sebenarnya) tinggal di sebuah rumah panggung lantai kayu dengan kondisi rumah yang sederhana, mempunyai anak yang disekolahkan di Jakarta. Ia memiliki lahan kebun seluas empat ha. Separuh lahan tersebut dikelola sendiri dengan bantuan seorang buruh kebun yang diupah. Sementara itu, sisanya diupahkan dengan sistem bagi hasil.

kemiskinan dapat dilihat dari kepemilikan dan ukuran luas lahan yang mereka miliki. Sementara atribut fisik dari rumah termasuk sebagai salah satu faktor adat, atau kebiasaan setempat. Dalam hal ini, fungsional rumah masih melekat sebagai bagian dari aspek budaya materi saja yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan keamanan agar terhindar dari ancaman luar.

Selanjutnya pada dimensi ketujuh yang berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian, menunjukkan bahwa keterbatasan berkaitan dengan keadaan sumber daya lokal yang tidak mendukung kepemilikan individu. Upaya untuk meningkatkan penghasilan bagi kehidupan keluarga diperoleh dengan cara serabutan, yaitu melakukan kegiatan lain yang tersedia di lingkungannya. Di desa ini hanya ada tiga keluarga yang memiliki lahan yang luasnya lebih dari 2 ha (4-20 ha). Rata-rata kepemilikan adalah 1-2 ha dan yang paling kecil memiliki lahan seluas 8000 m² saja. Bahkan, 40% dari penduduk tidak memiliki lahan usaha dan menggantungkan hidupnya sebagai buruh atau menurut istilah setempat adalah orang yang hidupnya “ikut makan gaji”.

Selain itu, penduduk mengalami kesenjangan dalam mengadopsi peralatan dan teknologi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat ruang gerak masyarakat. Selama ini mereka masih bertindak dalam pemahaman tradisional. Mereka belum terbiasa menggunakan alat-alat dengan teknologi baru yang belum mereka kuasai. Sebagai contoh, pada saat pemerintah memberikan bantuan sebuah kapal nelayan berteknologi baru, mereka tidak dapat menggunakannya. Kapal tersebut bahkan rusak dan teronggok di tepi pantai Arakan. Semua itu, merupakan satu siklus dari pengaruh rendahnya pendidikan yang mereka miliki, sehingga mereka lambat mengadopsi teknologi baru. Pendidikan yang dimiliki penduduk relatif kurang memadai sebagai pengetahuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang muncul belakangan. Situasi itu memunculkan apa yang disebut sebagai kesenjangan budaya (*cultural lag*), yaitu suatu keadaan dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan material (seperti halnya teknologi kapal bermesin besar sebagai alat untuk penangkapan ikan) terhadap unsur-unsur immaterial, seperti pola pikir dan tindak. Akibatnya, terdapat suatu keadaan di mana masyarakat tidak dapat mengejar perubahan yang ada.

Sebagai suatu masyarakat yang hidup dan selalu berinteraksi dengan sesamanya, perubahan sosial akan terjadi walaupun lambat.

Kondisi penduduk cukup banyak yang memiliki pendidikan tinggi bahkan S2. Saat ini, calon-calon terdidik lainnya sedang mengikuti pendidikan S1. Sayangnya, terdapat kecenderungan bahwa pendidikan telah dijadikan pintu masuk untuk mendapatkan berbagai kemudahan, dan mendapatkan akses atas berbagai kegiatan yang ada. Semua itu telah menjadikan mereka sebagai kelompok yang memperebutkan sumber daya lokal. Perkembangan pendidikan yang ada tidak berpengaruh terhadap upaya peningkatan kemampuan masyarakatnya. Pendidikan yang dimiliki sebagian penduduk tidak menjadi satu bagian dari adanya *transfer of knowledge* dari mereka yang lebih berpendidikan dan justru mengakibatkan situasi yang kontradiktif. Orang yang berpendidikan tidak berkuprah di desanya. Mereka menjadi calon legislatif (caleg) partai politik, yang kemudian memudahkannya untuk mendapatkan berbagai proyek daerahnya, atau bekerja di kota. Pada satu sisi, peningkatan pendidikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Di sisi lain, pendidikan juga telah menjadi salah satu alat untuk memperoleh dan memperkuat kekuasaan dan status sosial. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan tidak menjadi modal sosial yang meningkatkan tatanan kehidupan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Akibatnya, keadaan masyarakat masih tidak beranjak dari ketidakberdayaannya selama ini.

Sebagai sebuah desa pemekaran, desa ini relatif belum banyak berkembang. Semua aktivitas kehidupan sehari-hari penduduknya masih bergelut dalam kegiatan subsisten. Masyarakat masih terbelenggu pada kondisinya sebagai pekebun dan buruh di perkebunan. Mereka masih tergantung pada pemberian atau subsidi pemerintah, sebagaimana yang selama ini mereka dapatkan, seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Ketidakberdayaan ekonomi itu telah mengurangi daya saing dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, hal tersebut juga telah menjadi senjata untuk mendapat bantuan pemerintah, seperti program IDT atau sekarang dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, tampaknya kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama, yaitu suatu sikap kebersamaan masih tetap mereka jaga. Sebagaimana yang ada pada nilai "*mapalus*", yang masih berlangsung di desa ini sebagai suatu perangkat nilai kebersamaan karena adanya kesadaran bersama atas keterbatasan kemampuannya cara berpikir, berkarya, dan lain sebagainya (Tarigan, 2005). Suatu sistem atau teknik kerja sama untuk kepentingan bersama ini, merupakan bentuk gotong royong tradisional sebagai warisan nenek

moyang orang Minahasa. Tampaknya nilai-nilai kebersamaan dan saling menolong dalam bentuk budaya *mapalus* sebagai modal sosial itu masih tetap dijaga sehingga kemiskinan yang ada masih dapat ditoleransi. Selain itu, terdapat pula sebuah prinsip kerja sama yang sifatnya resiprositas yang merupakan transaksi antara dua pihak di mana barang atau jasa dipertukarkan. Transaksi tidak selalu berarti menggunakan uang. Prinsip resiprositas dalam tradisi *mapalus* ini menggunakan tenaga dan keahlian. Sebagai contoh, bagi penduduk yang mampu, akan mempekerjakan penduduk lainnya sebagai buruh di kebunnya. Dalam hal ini buruh tersebut menjadi tanggung jawab si pemberi kerja yang akan memberikan kecukupan pangan baginya. Dibalik prinsip *mapalus*, terdapat kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya untuk saling menghidupkan dan menyejahterakan dalam komunitasnya. Motif yang terkandung dalam tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun ini adalah memenuhi kewajiban sosial pada masyarakat sesuai dengan aturan adat setempat. Dilihat dari aspek ekonomisnya, sesungguhnya telah terjadi suatu prinsip resiprositas, yaitu transaksi antara dua pihak, di mana barang atau jasa dipertukarkan. Pihak pemberi kerja merasa mendapat bantuan tenaga dalam mengolah lahannya dan sebaliknya si pekerja merasa tertolong kehidupannya.

Sebagai suatu prinsip dasar dalam kehidupan bersama, *mapalus* dapat menjadi katup pengaman bagi kehidupan sosial. Dalam hal ini dapat kita temukan contoh dari kehidupan sosial di desa ini, misalnya penduduk yang aktivitasnya melaut, hasil tangkapannya selain untuk keperluan keluarga, juga menyisihkan sebagian hasil tangkapannya itu untuk diberikan pada kerabat dan tetangganya. Nilai-nilai kebersamaan ini berkembang dan masih dipertahankan yang diberlakukan bagi orang-orang terdekat termasuk tetangga yang berada dalam lingkup sekitar rumahnya. Dengan cara seperti itu pula, ruang kosong yang ada dalam lingkungannya itu dapat mereka isi, dan satu sama lain saling melindungi dan saling mengontrol tetangganya sehingga tidak terjadi kelaparan. Minimal bahan yang mudah diperoleh seperti ikan atau sayuran yang mereka tanam di pekarangan atau kebunnya menjadi satu bagian dari prinsip itu. Secara sosial sikap-sikap kebersamaan seperti itu pula yang telah menjadi kantong pengaman penduduk desa ini.

Penutup

Dalam kaitannya dengan kemiskinan yang terjadi di Desa Rap Rap, tampak bahwa kesulitan transportasi yang dialami penduduk desa ini

telah menyebabkan terhambatnya mobilitas fisik. Keterbatasan yang dihadapi penduduk telah menyeret mereka menjadi kelompok yang terikat dalam lingkungannya sendiri. Tentu saja adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat Desa Rap Rap. Sudah bukan rahasia umum bila infrastruktur yang belum berkembang dapat menyebabkan terbelakangnya suatu daerah, dan berimplikasi pada kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Sejalan dengan program mencerdaskan kehidupan bangsa, maka infrastruktur yang terlihat pada tingkat pendidikan masih relatif rendah. Kekurangan infrastuktur pendidikan menjadi kendala bagi peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Pengetahuan mereka tentang kehidupan sosial ekonominya maupun kebutuhan pangan yang baik, seperti gizi dan makanan sehat, masih terbatas. Kondisi ini mempengaruhi pengelolaan konsumsi yang tidak optimal.

Namun demikian, adanya nilai kebersamaan disebut *mapalus* yang ada telah menjadi satu modal sosial dalam kehidupan kemasyarakatannya. Sistem yang telah terinternalisasikan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Rap Rap tersebut, telah menjadi dasar bagi adanya tingkat kesejahteraan pada kelompoknya. Budaya *mapalus* ini mengandung juga suatu prinsip resiprositas, yaitu suatu pola kehidupan untuk adanya ikatan dan keharusan sosial dalam masyarakatnya agar saling membantu secara timbal balik. Sistem ini sudah berkembang baik dan telah menjadi satu modal sosial yang tetap dijaga masyarakat desa. Dalam kondisi sulit pun mereka masih dapat saling membantu dan melindungi. Rasa kebersamaan sebagai satu keluarga luas telah menjadi kunci dan motor penggerak bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Walaupun dalam kehidupan bersama itu selalu ada juga ketegangan dan saling bersinggungan terutama bila dihadapkan pada masalah kebutuhan dan bantuan pemerintah yang dinilai tidak kena sasaran. Unsur-unsur yang dianggap sebagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi penghalang dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Kelebihannya adalah sikap kebersamaan yang telah dikelola sejak lama, telah menjadi faktor perekat dan juga faktor penyeimbang dalam tatanan kehidupan sosialnya sehingga mereka masih dapat bertahan dengan baik hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). *Statistik Daerah Tatapaaan 2011*. Minahasa Selatan: BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2010). *Minahasa Selatan dalam Angka 2009*. Minahasa Selatan: BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
- Darwin, M.M. (2005). *Memanusiakkan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Foster, G. M. & Anderson, B. (1986). *Antropologi Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hall, C.S., Lindzey, G., Lochlin, J.C., & Monosevitz, M. (1985). *Introduction to Theories of Personality*. New York: John Wiley & Sons.
- Iskandar J. (September, 2012). *Food Ecology and Food Security on Sundanese Village*, Disampaikan pada Mini Seminar Pangan dan Gizi PMB-LIPI, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1986). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Jembatan.
- Lewis, O. (1988). *Kisah Lima Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maleha & Susanto, A. (2006). Kajian konsep ketahanan pangan. *Jurnal Protein*, 13 (2), 229-252.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. (2012). *Daftar Nominatif Siswa SMP Negeri 3 Tumpaan: Tahun Pelajaran 2011-2012*. Bahan Rekap SMP Negeri 3 Tumpaan.
- Suharto, E. (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- Susanto, D. (2012, September). *Determinan Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Kebiasaan Masyarakat Menggunakan Pangan (Food Habits) dan Ketahanan Pangan*. Disampaikan pada Mini Seminar Pangan dan Gizi PMB-LIPI, tanggal 13 September 2012. Jakarta.

Sumber dari Internet:

- Alkaff, R. (2012). *Problema Kemiskinan di Dinoyo Tambangan Kecamatan Tegalsari Surabaya* (Skripsi tidak Diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia). Diunduh dari <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/208/jiptiain--rugaya%20halk-10355-3-bab2%3b-n.pdf>.
- Hendra, Roy. (2010). *Determinan Kemiskinan Absolut di Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Utara Thun 2005-2007* (Tesis Magister Fakultas Ekonomi Magister Perencanaan & Kebijakan Publik Manajemen Sektor Publik Kemiskinan, UNiversitas Indonesia, Jakarta. Diunduh dari http://search.babylon.com/?q=determinan+kemiskinan+tesis+roy+hendra+fe+ui&babsrc=HP_ss&=web&rlz=0&as=2&ac=0).
- Tarigan, H. (2005). *Kelembagaan Ketenagakerjaan Mapalus pada Masyarakat Minahasa* (ICASEPS Working Paper No. 80). Diunduh dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Indonesia Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies). Departemen Peranian website: http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/WP_80_2005.pdf

